

## RETRIBUSI DAERAH

PERBUP TABALONG NO. 29, BD 2025/NO. 29, 24 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 1 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pemungutan retribusi daerah, Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. jenis Retribusi; b. pendaftaran dan pendataan Retribusi; c. penetapan Retribusi; d. pembayaran dan penyetoran Retribusi; e. penagihan Retribusi; f. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; g. pemanfaatan penerimaan Retribusi; h. pemeriksaan Retribusi; i. kadaluwarsa Retribusi; j. penghapusan piutang Retribusi; k. keberatan Retribusi; l. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. m. tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi; n. koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi Daerah; dan o. sosialisasi/fasilitasi Retribusi Daerah.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
    - a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
    - b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

- c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboraturium Lingkungan Pada Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 68 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- h. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
- i. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek;
- j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puser Kesehatan Masy. Puskesmas Pembantu Pos Kesehatan Desa / Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada Pusat kesehatan masyarakat, Pusat kesehatan masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling;
- k. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tabalong;
- m. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- n. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.